



AE Publishing

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial

Neila Susanti, M.S, M.Si

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal

Neila Susanti, MS., M.Si



AE Publishing

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial

Copyright © Neila Susanti, MS., M.Si

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa persetujuan Penerbit.

Editor : Ismail, M.Si
Desain Sampul : Musthofa K Rangkuti
Penata Letak : Rohaya

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI (240/JTI/2019)
Jln. Banurejo B no.17 Kepanjen
HP : 081231844977 / 085103414877
Email : publishing.ae@gmail.com
<http://aepublishing.id>

Cetakan ke-1, Agustus 2022

17 x 24 cm; viii + 90 hlm.

ISBN: 9786233066112

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, Buku yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial” ini akhirnya dapat diselesaikan.

Buku ini menyajikan kajian tentang modal sosial yang dimiliki majelis taklim khususnya yang beranggotakan kaum perempuan. Kajian ini menepis anggapan bahwa majelis taklim hanya identik dengan aktivitas ibadah vertikal. Ketika Pengurus atau Pembina Majelis Taklim peduli dan mau berinovasi dengan modal sosial anggotanya, maka terjadilah proses pemberdayaan komunitas atau yang dikenal dengan Community Development. Buku ini terdiri dari 4 bab, pada 2 bab pertama memaparkan mengenai teori dan konsep Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada bab selanjutnya pembaca dapat mengikuti proses pemberdayaan yang dilakukan pada tiga kelompok majelis taklim yang berbeda dengan karakter khas masing-masing.

Adanya hasil kajian ini diharapkan para pembaca (baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum) mudah memahami mengenai konsep modal sosial dan akhirnya tergerak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Buku ini cukup banyak pihak yang terlibat dan telah memberi bantuan kepada Penulis, sehingga pekerjaan yang dianggap berat ini sedikit lebih ringan. Berkaitan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya disampaikan kepada Prof. Usman Pelly, Dr. Hidayat dan Kak Dr. Nurasiah dan para mahasiswa penulis khususnya adinda Naya dan juga seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Mudah-mudahan segala jenis bantuan yang diberikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Buku ini juga penulis persembahkan kepada Mamah dan Almarhum Bapak tercinta, semoga Allah membalas kebaikan orangtua penulis dengan limpahan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya. Demikian juga kepada Suami dan putri semata wayang tercinta atas dukungan moral maupun materi. Love you all...

Neila Susanti, MS. M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I: MODAL SOSIAL DAN KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN	1
BAB II: MODAL SOSIAL	9
BAB III: POTENSI MODAL SOSIAL DALAM KERAGAMAN KOMUNITAS MASYARAKAT	23
BAB IV: UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK PENGAJIAN	29
BAB V: BENTUK MODAL SOSIAL KELOMPOK PENGAJIAN	41
BAB VI: AKTIVITAS PEMBERDAYAAN MODAL SOSIAL KELOMPOK PENGAJIAN	65
BAB VII: MANFAAT MODAL SOSIAL KELOMPOK PENGAJIAN	81
Tentang Penulis	89

BAB I

MODAL SOSIAL DAN KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN

A. Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan melalui Komunitas

Pemberdayaan mempunyai arti memiliki kemampuan untuk memberdayakan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu secara mandiri atau mengandalkan kemampuannya sendiri. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan, sebaiknya setiap orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan (Anwar, 2007).

Partisipasi masyarakat menjadi unsur pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat karena adanya partisipasi masyarakat memudahkan proses untuk menggerakkan sumber daya lokal karena berasal dari keinginan sendiri dan memunculkan berbagai kreativitas.

Adanya partisipasi masyarakat berarti upaya pemberdayaan berangkat dari kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan diawali dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mandiri. Pemberdayaan juga dilakukan dengan cara memberi motivasi, peluang, dan menghindari campur tangan atau memberi kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan arahan, pembekalan pengetahuan dan berupaya untuk membentuk jaringan sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan ekonomi dan bidang sosial. Pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Pendidikan dapat membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih layak, meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat.

Pemberdayaan di bidang ekonomi berkaitan dengan peningkatan kemampuan untuk meningkatkan penghasilan. Pemberdayaan di sini bisa berupa peningkatan keahlian atau keterampilan untuk memproduksi barang atau jasa, peluang memperluas jaringan pemasaran dan sebagainya.

Pemberdayaan di bidang sosial ditujukan agar tiap individu mampu berperan, berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas kehidupan bermasyarakat. Masing-masing mampu berkontribusi sesuai potensi atau kemampuan yang dimilikinya apakah berupa pemikiran, gagasan atau tindak nyata.

Pemberdayaan masyarakat di bidang apapun pada akhirnya mengarah ke tujuan pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat terutama dari keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur yang strategis dalam membangun sebuah negara. Reformasi politik 1998 di Indonesia memunculkan wacana pembentukan masyarakat sipil (*civil society*). Wacana ini muncul sebagai hasil evaluasi pembangunan di Indonesia yang sebelumnya cenderung *top down*. Masyarakat sipil menekankan masyarakat yang berdaya atau mandiri. Untuk itu dibutuhkan partisipasi komunitas-komunitas lokal yang mampu memberdayakan dirinya secara internal dan secara eksternal mampu memberdayakan lingkungannya.

Komunitas lokal mempunyai potensi yang cukup strategis untuk membangun kemandirian masyarakat dan pada akhirnya akan berpengaruh untuk mempercepat upaya membangun bangsa. Hal ini sudah dinyatakan oleh Pelly (2015) bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) partisipasi sosial, (2) sikap mental, tekad, disiplin, dan (3) semangat (etos kerja) masyarakat.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan atau menggerakkan partisipasi sosial tersebut? Salah satu kuncinya adalah partisipasi sosial akan terjadi ketika komunitas lokal berdaya atau mandiri dengan kata lain mampu melakukan pemberdayaan dalam komunitasnya. Konteks pemberdayaan di sini tentu bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, keagamaan, politik dan sosial.

Suatu realita bahwa Indonesia kaya akan komunitas lokal, bentuknya cukup bervariasi seperti majelis taklim atau kelompok pengajian, wirid yasinan, paguyuban warga, perkumpulan etnik tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda masjid, pemuda Katolik atau Kristen, pemuda Hindu atau Buddha, perkumpulan kematian, perkumpulan arisan, lembaga keuangan masyarakat, perkumpulan kesenian, perkumpulan olahraga, lembaga musyawarah adat, ikatan keluarga, ikatan suka duka, dana sehat dan organisasi (Widodo, 2011).

Di antara sekian banyak komunitas lokal tersebut, di sini penulis akan fokus terhadap majelis taklim di kota Medan (penulis menggunakan istilah kelompok pengajian sebagaimana yang lebih sering dipakai oleh komunitas umat Islam di kota Medan).

Kemudian dalam mengkaji pemberdayaan kelompok pengajian sebagai komunitas lokal ini akan dianalisis dengan pendekatan teori modal sosial. Fukuyama (2001) menyatakan pentingnya dimensi kultural dan pendayagunaan peran lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dalam masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses-proses pembangunan. Menurut Fukuyama, lembaga-lembaga tersebut mampu melakukannya karena memiliki modal sosial (*social capital*). Dalam hal ini Putnam (1993) menunjukan modal sosial kepada komunitas lokal yang di dalamnya berisi (1) jaringan-jaringan (*networks*) (2) norma-norma (*norms*) dan (3) kepercayaan (*trust*). Menurutnya, jika modal sosial yang dimiliki komunitas lokal ini dapat dikembangkan maka proses menuju masyarakat modern menjadi mungkin untuk diwujudkan.

Kelompok pengajian memiliki modal sosial yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang memotivasi mereka untuk melakukan perilaku kebajikan, ikatan ukhuwah atau solidaritas sesama anggota atas dasar saling percaya sehingga terjalin jaringan-jaringan yang berwujud kerjasama antar anggota. Jaringan yang terbentuk memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, sehingga tumbuh kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Pada dasarnya, kelompok pengajian dalam konteks Indonesia adalah lembaga pendidikan Islam nonformal yang mengajarkan Islam, sehingga bisa dikatakan bahwa kelompok pengajian merupakan salah satu komunitas keagamaan yang sudah lama ada di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur institusi pendidikan, maka dibentuk lembaga-lembaga formal seperti madrasah, pesantren dan sekolah.

Kelompok pengajian biasanya dibentuk atas dasar keinginan penduduk setempat. Di kota Medan, walaupun belum ada data jumlah yang pasti namun keberadaannya ada sampai di tingkat lingkungan kelurahan. Bahkan, biasanya setiap masjid menyelenggarakan kelompok pengajian tersendiri. Secara rutin mereka mengadakan kajian keislaman dan ada juga yang khusus melakukan wirid *yasin*. Namun, ada fenomena lain yang ditemukan pada beberapa kelompok pengajian di kota Medan, yaitu selain aktivitas ibadah seperti lazimnya sebuah kelompok pengajian, mereka juga melakukan aktivitas dalam rangka pemberdayaan komunitas mereka di berbagai bidang seperti aktivitas di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi anggota.

Aktivitas di bidang pendidikan seperti menggalang dana untuk mendirikan bangunan sekolah atau madrasah, mengadakan rumah Quran, aktivitas di bidang ekonomi seperti memberikan pelatihan keterampilan yang bernilai ekonomis bagi pesertanya dan mendirikan koperasi atau kelompok usaha yang ditujukan untuk anggota maupun masyarakat umum. Aktivitas di bidang sosial seperti melakukan penggalangan dana bagi daerah yang terkena musibah seperti pengungsi Gunung Sinabung di daerah Karo dan sebagainya.

B. Pengertian Majelis Taklim atau Kelompok Pengajian

Ada beberapa istilah atau sebutan yang ditujukan kepada aktivitas mempelajari agama Islam secara non formal yaitu majelis taklim, *halaqoh*, atau kelompok pengajian. Menurut etimologis (arti kata), majelis taklim berasal dari Bahasa Arab, terdiri dari dua kata yakni *majlis* dan *taklim*. Majelis taklim dapat diartikan sebagai tempat untuk mengadakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Selanjutnya, dalam perkembangannya majelis taklim tidak lagi terbatas sebagai tempat pendidikan dan pengajaran saja, tetapi telah menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan berbagai bentuk dan usaha untuk kemaslahatan anggota dan lingkungannya.

Majelis taklim merupakan sarana pendidikan Islam secara non-formal yang tertua di Indonesia, dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan berkembangnya ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, muncul lembaga-lembaga formal seperti pesantren, madrasah dan sekolah. Majelis taklim biasanya dibentuk atas dasar keinginan penduduk setempat yang beragama Islam. Keberadaan majelis taklim ada sampai di tingkat lingkungan (kelurahan). Bahkan, satu orang bisa mengikuti lebih dari satu majelis taklim. Secara struktural, majelis taklim dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris dan bendahara biasanya dipilih secara aklamasi oleh anggota.

C. Peran Majelis Taklim/Kelompok Pengajian

Peran mempunyai arti sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang terkait dengan jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Peran juga mempunyai arti yang sama dengan partisipasi yang berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Peran majelis taklim maksudnya adalah peran yang dilakukan oleh majelis taklim dalam berbagai kegiatan atau program yang memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan politik yang ditujukan kepada anggota majelis taklim ataupun ke masyarakat umum.

Aktivitas rutin majelis taklim mengadakan pengajian seminggu sekali, berupa kajian keislaman yang diberikan oleh mualim atau mualimah seperti kajian akidah dan ibadah. Kegiatan ceramah majelis taklim bervariasi, ada yang dalam bentuk ceramah umum, diskusi dan pembacaan kitab tertentu oleh mualim atau mualimah dan ada juga melakukan wirid *yasin*. Wirid *yasin* artinya suatu pembacaan surat *yasin* yang diyakini sebagai ibadah yang mulia di sisi Allah, dapat memberikan kesejukan hati, kedamaian jiwa serta membantu menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi (Latif, 2003).

Wirid *yasin* menjadi rangkaian tradisi takziah di kalangan umat Islam Indonesia dan diyakini dapat menumbuhkan nilai-nilai keluhuran dan mengembangkan ajaran Islam (Rodin, 2013).

Dalam pelaksanaan wirid *yasin* ada pengaturan tata cara, jumlah, dan waktu pembacaan zikir (berupa ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an, doa-doa, atau nama-nama mulia Allah (asmaul husna).

Majelis taklim juga sebagai serikat tolong menolong (STM) bagi umat Islam. Sebulan sekali pengurus memungut iuran STM dan memberikannya sebagai sumbangan bagi anggota yang mengalami musibah. Berdasarkan dari kelompok sosial dan dasar pengikat jemaahnya, majelis taklim dapat dikelompokkan dalam beberapa macam yaitu, berdasarkan peserta, ada majelis taklim khusus kaum ibu, kaum bapak, remaja dan ada yang campur tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan umur. Ada juga kelompok majelis taklim yang diadakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan, organisasi politik, instansi tertentu atau kelompok penduduk di suatu daerah.

Majelis taklim merupakan salah satu organisasi lokal yang ada sampai tingkat kelurahan. Secara umum menurut Widodo (2011), ada beberapa ciri organisasi local :

1. Berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
2. Keanggotaan di dalam organisasi lokal pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat.
3. Pendiannya berdasarkan pada tujuan memberikan pelayanan sosial dengan prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat lokal,
4. Organisasi lokal yang mandiri biasanya mampu secara swadaya membiayai program dan kegiatannya, tanpa harus bergantung pada pihak luar.

Keempat ciri di atas melekat pada setiap majelis taklim, kecuali ciri ketiga, tidak semua majelis taklim melakukan pelayanan sosial. Biasanya mereka fokus pada pembinaan pengetahuan ibadah keislaman untuk anggota majelis taklimnya. Berdasarkan kegiatan organisasi lokal, dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yakni:

1. Kegiatan dalam upaya memperkuat lembaga adat atau kebudayaan,
2. Pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian,
3. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau *yasinan*, pendalaman rohani, peringatan hari besar agama,
4. Kegiatan usaha kesejahteraan sosial, seperti santunan yatim piatu, santunan fakir miskin, santunan anak putus sekolah, santunan keluarga miskin,
5. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka majelis taklim biasanya hanya melakukan kegiatan keagamaan, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan ada beberapa majelis taklim dengan potensi modal sosial yang dimilikinya melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang ekonomi, sosial atau pendidikan. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi bergantung pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat diberdayakan berdasarkan kebutuhan yang mereka perlukan. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Ketiga konsep ini dimiliki oleh organisasi lokal termasuk majelis taklim.

Tentang Penulis

Neila Susanti, MS., M.Si adalah Dosen Tetap di Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Pendidikan S1 di Jurusan Antropologi USU, dan Antropologi Sosial Pascasarjana Unimed. Penulis juga tercatat menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana di USU dengan bantuan beasiswa URGE (Kerjasama Bank Dunia-Dikti).

Selain sebagai akademisi Beliau juga tercatat pernah aktif sebagai pengurus di LSM Gema Khadijah Sumatera Utara, LSM Lembaga Cinta Keluarga Medan dan sejak 2020 bergabung sebagai pengurus di Ormas Alppind (Aliansi Perempuan Peduli Indonesia) wilayah Sumatera Utara. Penulis juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Antropologi Indonesia dan Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar (2007) *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung Alfabeta. Candland,

Christopher (2000) "*Faith as Social Capital: Religion and Community Development in Southern Asia Policy Sciences*", Belanda: Kluwer Academic Publisher.

Fukuyama (1997) Francis, *Social Capital*, the Tanner lectures On Human Values Brasenose College, Oxford.

Frederick, Gloria B (2003), "Faith-Based Community Organizations", *Spectrum: The Journal of State Government*, ed. Winter, New Jersey: Ebsco Publishing.

Koentjaraningrat (1983) *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.

Krishna, Anirudh (2000) *Creating and Harnessing Social Capital. Social Capital a Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.

Lubis, Zulkifli (1999) *Rekayasa modal sosial dalam pengelolaan sumber daya alam studi kasus pengelolaan Lubuk Larangan di Kecamatan Kotanopan Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian, tidak terbit. Medan: USU.

Malikah (2013) "Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam. *Jurnal Al-'Ulum* Volume 13 Nomor 1, IAIN Sultan Amai Press: Gorontalo.

Martokoesoemo, Priatno (2007) *Spiritual Thingking*, Sukses dengan *Neuro Linguistic Programming* dan Tasawuf, Cet II, Bandung: Mizan.

Mauludi (2008) *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami*, Tesis, tidak diterbitkan, Medan: USU.

Pelly, Usman (2015) *Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Bangsa*, Etnisitas dalam Politik Multikultural (Buku I), Medan: Casa Mesra Publisher.

----- (2016) Modal Sosial dalam Keluarga dan Politik dalam Etnisitas dalam Politik Multikultural (Buku II), Medan: Casa Mesra Publisher.

Putnam D, Robert (ed) (2004) *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, Oxford; Oxford University Press.

----- (1993) *The Prosperous Community, social capital and public life*, TAP.

Rafik dan Asyhabuddin (2005) “Nilai-Nilai dasar Islam sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Masyarakat.” *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 2 Desember. Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga.

Rodin, Rhoni (2013) “Tradisi Tahlil dan Yasinan”, *Jurnal Ibdā Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam*, Volume 11 Nomor 1, Purwokerto: LPPM IAIN Purwokerto

Sembiring, Sri Alem dan Lister Berutu (2004) *Modal Sosial dalam Komunitas Kuta Etnis Karo dan Relevansinya dengan Otonomi Daerah*, USU

Shabibi, M.Ridho (2007) Dinamika Aktivitas Majelis Taklim dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Perkotaan Kota Bengkulu, (Suatu Bangun Optimalisasi Fungsi Masjid), *Jurnal Manhaj*, Vol 7 No 1 April, Bengkulu: IAIN Bengkulu

Widodo, Nurdin dan Suradi (2011) Profil Dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat, *jurnal Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02, Jakarta: Puslitbangkesos Kemensos RI.

Yafiz, Muhammad, Azhari Akmal Tarigan, Isnaini Harahap, Marliyah (2015) *Membangun Ekonomi Kejamaah Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Pada Desa Matfa Kabupaten Langkat)*, Laporan hasil penelitian FEBI UIN-Sumatera Utara,